

EMPOWERMENT VERSUS SOCIAL SECURITY

Leta Rafael Levis

Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Undana

Email: letarafaellevi06@gmail.com

ABSTRACTS

This paper is an opinion writer about community empowerment. The purpose of the opinion is to provide readers with an understanding that empowerment is an activity that focuses on changing client behavior so that they are able to exploit their potential as well as various capital injections and external working methods so that they can increase production, income and welfare. So empowerment is very different from social security, which is assistance only to channel the prepared budget. The method used is literature review and field conservation of several empowerment programs. The data analysis method is descriptive qualitative. The results obtained are that the empowerment that has been implemented so far is still limited to social and political assistance, on the contrary, it is not based on planning to change the behavior of millennials so that they can get out of underdevelopment and poverty.

Keywords: empowerment, social security, community behavior, re-enforcement.

ABSTRAK

Tulisan ini merupakan sebuah opini penulis tentang pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari opini adalah untuk memberikan pemahaman kepada pembaca bahwa pemberdayaan adalah suatu kegiatan yang berfokus pada perubahan perilaku klien agar mereka mampu memanfaatkan potensi yang dimiliki serta berbagai suntikan modal dan cara kerja dari luar sehingga mereka dapat meningkatkan produksi, pendapatan dan kesejahteraan. Jadi pemberdayaan sangat bertolak belakang dengan 'social security' yakni bantuan hanya untuk menyalurkan anggaran yang telah disiapkan. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka dan observasi lapangan terhadap beberapa program pemberdayaan. Metode analisis data adalah secara deskriptif kualitatif. Hasil yang diperoleh adalah pemberdayaan selama ini yang dilaksanakan masih sebatas bantuan-bantuan yang bersifat social dan politis, sebaliknya tidak berbasis pada perencanaan untuk merubah perilaku milenial agar mereka bisa keluar dari keterbelakangan dan kemiskinan.

Kata kunci: empowerment, social security, perilaku masyarakat, re-enforcement.

PENDAHULUAN

Puluhan tahun, kata pemberdayaan sangat akrab di telinga kita. Pemberdayaan (*Empowerment*) secara gampang dapat diartikan sebagai suatu proses peningkatan kemampuan atau kekuatan (tenaga) kepada seseorang agar yang bersangkutan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sebagai modal untuk meningkatkan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat berarti terjadi proses

pemberian energi ekstra kepada masyarakat agar mereka mampu meningkatkan keterampilan dan kemauan dalam mengelola sumber daya yang mereka miliki untuk meningkatkan pendapatan menuju kehidupan yang diinginkan.

Di dalam proses pemberdayaan terdapat beberapa unsur pokok yang terintegrasi dalam proses tersebut. Unsur-unsur yang dimaksud seperti 1) manusia, 2) modal, 3) *existing business* (usaha yang

sedang dan akan dikembangkan), 4) *change agent* (penyuluh/pendamping/fasilitator), 6) inovasi, dan 7) proses adopsi inovasi untuk meningkatkan produktifitas melalui pemanfaatan potensi serta modal yang diterima. Kesulitannya adalah setiap orang memiliki kebutuhan energi ekstra berbeda dan belum ada kelompok masyarakat yang bersifat egaliter.

Metode Penulisan

Paper ditulis dengan menggunakan studi literatur, pengalaman pribadi dan analisa penulis. Data yang dikumpulkan berupa data sekunder. Analisis data dilakukan secara naratif kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Sejauh ini banyak dana telah diberikan dengan 'cuma-cuma' kepada masyarakat dalam bingkai pemberdayaan. Kita ambil contoh, program IDT, dana ratusan miliar telah diberikan kepada masyarakat. Hasilnya? Sampai akhir 2002, hanya 20 % usaha berhasil dan dana tersebut masih bergulir. Banyak orang yang kurang paham dengan pemberdayaan -yang lasim juga disebut program perubahan perilaku- menganggap program tersebut gagal. Kemudian, program pemberdayaan petani melalui program IFAD. Program ini hasilnya lebih baik dari program IDT karena rancangan dan tahapan pelaksanaan memang sedikit berbeda. Banyak keunggulan dari program ini yang belum dimiliki oleh program pemberdayaan lain yang pernah ada di NTT. Hasilnya?. Dengan menghabiskan dana puluhan miliar, kegiatan ini telah menyulap tanaman jambu mente menjadi *trade mark* komoditi unggulan NTT.

Buktinya, produksi perkebunan NTT tahun 1998 hanya 108.788 ton naik menjadi 134.360 ton pada tahun 2003 atau naik sebesar 4.53%. Beberapa program pemberdayaan lain pun mungkin memiliki kelebihan.

Keduanya hanyalah salah dua dari sekian banyak program pemberdayaan yang telah digulirkan. Kita memang doyan mencoba sesuatu yang baru sehingga mengabaikan hal yang sudah dilaksanakan sebelumnya sekalipun hal tersebut baik. Padahal keduanya memiliki nilai-nilai positif dalam konteks pemberdayaan tetapi ditinggalkan tanpa berpikir untuk melakukan *re-enforcement* (penguatan) dan *repetition* (pengulangan) guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pemberdayaan. Pada menurut salah satu ahli perilaku (Lawrence Green, 1991) bahwa salah satu aspek oenting dalam merubah perilaku adalah re-enforcement dari pemerintah. Pemnguatan-penguatan sangat diperlukan dalam mewujudkan perilaku sesuai harapan. Jika perilaku klien tidak berubah berarti pemberdayaan dikatakan gagal.

Dalam evaluasi yang dilakukan oleh penulis (Ketua Tim) dengan kawan-kawan terhadap dampak program IDT (2002) dan Program IFAD (2004), terdapat sejumlah benang merah yang mestinya menjadi pelajaran bagi pengambil kebijakan pembangunan (pemberdayaan masyarakat di NTT). Salah duanya adalah kesiapan masyarakat. Secara umum kedua program tersebut belum mampu menyiapkan mental masyarakat secara baik dalam mengelola uang atau materi yang diberikan. Dengan tidak bermaksud

mengkritik proses pemberdayaan yang kita lakukan selama ini, proses persiapan atau *social awareness* dari obyek penerima program belum dijalankan secara baik dan sistematis. Kedua, setiap program pemberdayaan yang dilaksanakan selama ini telah memberikan hasil pada perbaikan kehidupan masyarakat walau prosentasinya sangat kecil dan sebagian besar dari hasil tersebut bukan disebabkan oleh rancangan dari program pemberdayaan tetapi lebih pada responsitas anggota masyarakat inovatif terhadap perubahan yang terjadi disekitar lingkungannya.

Untuk meningkatkan performa pelaksanaan pemberdayaan di NTT, tanggal 12 Juni 2002 (Pos Kupang 14 Juni 2002), para Bupati, walikota dan Ketua DPRD serta Gubernur NTT telah melakukan kesepakatan untuk mempercepat pelaksanaan penanggulangan kemiskinan karena masih sangat banyak masyarakat di NTT hidup di bawah garis kemiskinan. Hal-hal yang disepakati adalah soal strategi, kondisi geografis, jenis dan sasaran masalah dan jumlah dana. Dari kesepakatan ini keluarlah kebijakan bahwa untuk masing-masing kabupaten/kota perlu mengalokasikan dana khusus untuk penanggulangan kemiskinan dalam APBD masing-masing kabupaten/kota. Kabupaten/kota pun diisinkan untuk meminta dana dari pusat untuk tujuan yang sama. Agar supaya kesepakatan dan program tersebut dapat berjalan efektif, dibentuklah Forum Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (FKPK). Tugas forum ini antara lain adalah 1) meningkatkan komunikasi informasi, dan 2) meningkatkan koordinasi dalam proses

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta pengawasan. Kita belum tahu apakah kesepakatan tersebut masih disimpan?.

Pada saat Rakorbang Tahun 2003, Bapak Piet A. Tallo dan Bapak Frans Labu Raya menetapkan program prioritas utama untuk Tahun 2004 yaitu pengentasan kemiskinan (Pos Kupang 15 Juli 2003). Hasilnya, kita kurang beruntung karena tahun 2005 kita tertimpa penyakit busung lapar dan sebagainya. Pertanyaannya, sejauh manakah eksistensi forum tersebut dan komitmen pemerintah tersebut?. Jika forum penanggulangan kemiskinan dan komitmen sudah dibentuk, akankah pembentukan badan SPKD (Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Pos Kupang, 7/2/2006) lebih baik?. Salah satu alasan dibentuknya badan ini (kalau jadi) adalah karena selama ini-katanya- tidak ada koordinasi yang baik dalam penanggulangan kemiskinan. Logikanya, jumlah institusi semakin banyak berdampak kurang baik dalam hal koordinasi. Lalu kalau boleh kita bertanya lagi, apakah setelah adanya Badan SKPD ini upaya pengentasan kemiskinan ini akan menjadi lebih baik ?.Dan, bagaimana kaitannya dengan FKPK?. Mengapa kita masih doyan membentuk badan baru dalam menangani sesuatu?. Mengapa kita enggan menggunakan pengalaman kegagalan dan keberhasilan penanggulangan kemiskinan sebelumnya menjadi kekuatan untuk memperbaiki kinerja pemberdayaan?.

Social security

Ketika penulis menjadi penduduk sementara Australia beberapa waktu lalu,

saya mempelajari banyak hal. Salah satunya adalah “pemberdayaan” suku Aborigin. Banyak pengamat mengkritik kebijakan pemerintah Australia dalam hal pemberdayaan kaum Aborigin ini. Para kritikus menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah bukan proses pemberdayaan tetapi suatu upaya sistematis untuk memperlemah posisi kaum Aborigin dalam kehidupan sosial politik di negara tersebut.

Kebijakan yang dimaksud adalah para penganggur yang kebanyakan warga Aborigin diberikan uang ‘pemberdayaan’ sebesar AU\$400 (sekitar 2, juta rupiah pada tahun 2001) per dua minggu. Uang ini langsung dimasukkan ke dalam rekening masing-masing “penganggur”. Uang ini pula digunakan oleh kaum *unemployed* untuk membiayai kehidupannya termasuk untuk minum mabuk, judi, dan keperluan lainnya. Pemberian uang ini disenangi oleh kaum Aborigin termasuk para imigran yang telah menjadi *Permanent Residence* (Pi aR) sehingga tidak ada gerakan sosial untuk memprotes berbagai kelemahan pemerintah. Inilah yang disebut sebagai *social security* (keamanan sosial). Pemerintah merasa berhasil karena telah membagikan uang secara merata kepada para *unemployed*. Padahal sudah jelas bahwa kebijakan tersebut tidak memiliki energi tambahan yang diterima kaum tersebut.

Pemberdayaan di NTT?

Apakah pengalaman kaum *unemployed* di Australia berbeda dengan kondisi yang dialami masyarakat miskin di NTT?. Menurut saya, hasilnya tidak berbeda bahwa tidak ada aspek pemberdayaan

karena selama ini tidak ada energi ekstra yang diterima masyarakat setelah mereka menerima uang. Bedanya, negara Australia adalah negara kaya sehingga pantas kalau ia membagi-bagikan uang untuk rakyatnya. Tetapi kita membagi uang dari hasil pinjaman.

Selama ini pemerintah kita lebih mementingkan faktor keamanan sosial dalam slogan pemberdayaan masyarakat daripada proses pemberdayaan itu sendiri. Hasil yang paling negatif adalah: 1) masyarakat telah merubah perilaku produktif (usaha menghasilkan uang) dengan perilaku konsumtif (biar tidak kerja pasti dapat doi). 2) Tingkat ketergantungan masyarakat terhadap pihak luar semakin ‘menggila’. 3) Perilaku menyimpang seperti perjudian, mabuk tumbuh subur di kalangan masyarakat. 4) Setiap orang mengaku miskin sehingga pemerintah sendiri bingung siapa saja yang benar-benar miskin dan membutuhkan bantuan. 5) Tidak memiliki *existing business* namun menuntut agar diberikan uang pemberdayaan. 6) Masyarakat menganggap memiliki hak untuk mendapatkan dana. 7) Mentalitas instan menjadi bagian dari perilaku setiap hari. Perilaku masyarakat seperti inilah yang menjadi kendala paling besar dalam pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan di NTT. 8) mentalitas instan juga diperkuat oleh kemajuan teknologi melalui media sosial.

Perlu inisiasi alternatif

Pemberdayaan selain memenuhi unsur-unsur yang disebutkan dalam awal tulisan ini, dan sesuai pengalaman selama ini, perlu inisiasi alternatif cara atau metode

dalam memberdayakan masyarakat. Cara yang dimaksud adalah; 1) Memperbaiki sistem realisasi anggaran. Selama ini, program anggaran awal tahun tetapi uangnya keluar akhir tahun. Kedepan, dana yang telah disetujui DPR sebaiknya keluar lebih awal agar proses pemberdayaan terutama persiapan masyarakat berjalan lebih tenang agar hasilnya lebih baik. 2) *Reward and punishment system*, artinya petani/masyarakat yang telah menerima dana setelah dievaluasi ternyata tidak berbuat apa-apa maka yang bersangkutan tidak boleh lagi menerima uang pada waktu yang akan datang. Berbagai hasil kajian kurang lebih 30% dana yang diterima masyarakat digunakan untuk keperluan adat isitiadat, 3) Mengikuti kaidah pemberdayaan masyarakat secara benar, menghindari penggunaan metode kampanye yang isinya hanya slogan pembangunan semata. Salah satunya adalah identifikasi kelompok masyarakat berdasarkan kemampuannya untuk menerima inovasi (inovator, pelopor, penganut dini, dan pengikut akhir atau kolot), 4) Jika pemerintah dan DPR benar-benar memiliki kepedulian terhadap nasib rakyat maka seharusnya pembahasan tentang anggaran untuk pemberdayaan masyarakat lebih ditingkatkan, 5) Meningkatkan efektifitas interaksi antara pendamping/penyuluh/fasilitator dengan masyarakat binaan, 6) Menggunakan input-input hasil evaluasi program pemberdayaan masyarakat sebelumnya untuk meningkatkan kinerja pemberdayaan, 7) Untuk mengurangi mental ketergantungan masyarakat terhadap pihak luar, maka apa salahnya

kalau kita menghentikan secara bertahap program pemberian uang atau materi secara cuma-cuma bagi masyarakat karena akan menciptakan perilaku instan dan konsumtif di tengah masyarakat, dan 8) Menggunakan sistem *pilot project* agar kemajuan masyarakat mudah diukur. Semoga.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari uraian singkat di atas, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemerintah telaah berupaya maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan.
2. Pemberdayaan yang dilaksanakan selama ini oleh pemerintah selama ini belum ada kesungguhan dari pihak terkait untuk focus pada upaya merubah perilaku petani /masyarakat.
3. Program pemberdayaan yang dilakukan dengan pola siklus anggaran tahunan dianggap sangat tidak efektif dalam kinteks merubah perilaku masyarakat.
4. Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan selama ini tidak didukung oleh kompetensi para pendamping, mereka umumnya tidak menguasai hal-hal teknis dari usaha masyarakat, mereka juga tidak pandai berkomunikasi serta tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam hal mentransfer ilmu pengetahuan yang mereka miliki melalui pelatihan partisiptif kepada para petani.

Oleh karena itu, disarankan kepada pemerintah agar melakukan penguatan-penguatan dan juga menerapkan award and punishment system kepada pendamping dan juga kelompok masyarakat yang berhasil dan mereka yang tidak mampu mengelola program pemberdayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Levis, L.R. 2019. Pemberdayaan Masyarakat: Petani di Lahan Kering. Universitas Brawijaya Press. Malang.
- Laporan Evaluasi Program IDT, 2002, Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi NTT, Kupang.
- Laporan Evaluasi Program IFAD, 2004, Dinas Perkebunan Provinsi NTT, Kupang.
- Pos Kupang, Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Tanggal 7/2/2006.